

Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai mata pencaharian dengan jaringan atau sindikat yang terorganisasi dengan rapi atau ada juga yang melakukannya karena himpitan ekonomi sehingga memaksa si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut karena dalam pikirannya sudah tidak ada lagi jalan keluar selain mencuri. Dalam hal ini hakim untuk memberikan Putusan pidana harus memberikan kemanfaatan kepada terpidana untuk menjalani pemidanaanya dan kehidupan setelah keluar dari lembaga permasyarakatan untuk kembali ke masyarakat lagi. Karena pemberian pidana yang tidak adil nantinya akan berpengaruh pada kelangsungan hidup terpidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) kebijakan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan tujuan pemidanaan, (2) kebijakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang harusnya berdasarkan tujuan pemidanaan yang dianalisa dari tujuan pemidanaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data secara kualitatif dan permasalahan dianalisis dengan teori relatif pemidanaan, teori keadilan dan pertimbangan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) dalam alur putusan pada putusan perkara no.71/Pid.B/2019/PN.Blora menerangkan bahwasanya hakim melaksanakan pertimbangan berdasarkan yuridis pada Pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum yang mana menentukan unsur-unsur yang ada pada tindakan terdakwa saat melaksanakan aksi pencurian. Pertimbangan yang dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan juga berupa pengertian terhadap tujuan pemidanaan sendiri, (2) Tujuan pemidanaan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang didukung oleh unsur yuridis pada Pasal 56 RUU KUHP, dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2).

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pencurian, Tujuan Pemidanaan.**

## **ABSTRACT**

Crime of theft is usually influenced by several factors, such as livelihoods with neatly organized networks or syndicates or some that do so because of economic pressures that force the offender to commit the crime because in his mind there is no longer a way out other than stealing. In this case the judge to give a criminal verdict must give benefit to the convicted person to undergo his conviction and life after leaving the prison to return to the community again. Because giving an unfair criminal will later affect the survival of the convicted person.

This study aims to review and analyze: (1) the policy of judges' consideration in the decision of a criminal act of theft based on criminal purposes, (2) the policy of judges' consideration in deciding cases of theft of criminal acts which should be based on the objectives of punishment analyzed from the purpose of punishment.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data with literature and document studies. Data analysis was qualitatively and the problem was analyzed with the relative theory of punishment, justice theory and judges' consideration.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) in the flow of the decision on the case decision No. 71 / Pid.B / 2019 / PN. Blora explained that the judge carried out judicial-based considerations in the article indicted by the public prosecutor which determines the elements which the defendant's actions while carrying out the act of theft. Considerations made by the judge before passing the verdict are also in the form of an understanding of the purpose of criminal punishment themselves, (2) the purpose of punishment as a judge's consideration in deciding the criminal act of theft supported by a juridical element in Article 56 of the Draft Law of the Criminal Code, and the Law Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power in Article 5 paragraph (1) and Article 8 paragraph (2).

**Keywords:** Judge's Considerations, Criminal Act, Theft, Criminal Purpose.

## **DAFTAR ISI**